

## GOVERNANSI BUDAYA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI JAWA BARAT

Fadjar Tri Sakti<sup>1)\*</sup>

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia<sup>1)</sup>

Email: fadjartrisakti@uinsgd.ac.id\*

### Riwayat Artikel

Diterima: 17 Januari 2025

Disetujui: 19 Februari 2025

Diterbitkan: 4 Maret 2025

### Abstract

*This study highlights the urgency of preserving local culture amid globalization and the commercialization of tourism. Saung Angklung Udjo (SAU) exemplifies cultural governance by integrating art, education, and creative economy into sustainable tourism development in West Java. Using a qualitative method and case study approach, this research analyzes collaborative practices among government, local communities, and cultural actors in maintaining Sundanese cultural sustainability. The findings reveal that artistic innovation, digital adaptation, and community empowerment are key factors in SAU's success. Beyond economic benefits, its governance model strengthens local identity and social cohesion. This research contributes theoretically to the advancement of cultural governance and offers an inclusive, sustainable model for culture-based tourism policy.*

**Keywords:** Cultural Governance, Sustainable Tourism, Community Empowerment

### Abstrak

Penelitian ini berangkat dari urgensi pelestarian budaya lokal di tengah arus globalisasi dan komersialisasi pariwisata. Saung Angklung Udjo (SAU) menjadi contoh nyata penerapan *governansi budaya* yang mengintegrasikan seni, pendidikan, dan ekonomi kreatif dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Jawa Barat. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis praktik kolaboratif antaraktor pemerintah, komunitas lokal, dan pelaku seni dalam menjaga keberlanjutan budaya Sunda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi kesenian, adaptasi teknologi digital, dan pemberdayaan masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan SAU. Selain menghasilkan nilai ekonomi, model tata kelola budaya di SAU juga memperkuat identitas lokal dan kohesi sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap penguatan konsep *cultural governance* dan menawarkan model kebijakan pariwisata berbasis budaya yang inklusif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** governansi budaya, pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat

### A. PENDAHULUAN

Pariwisata berbasis budaya merupakan salah satu instrumen strategis dalam memperkuat identitas lokal sekaligus mendorong pembangunan ekonomi daerah (Richards, 2018). Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek hiburan, tetapi juga pada upaya pelestarian nilai-nilai tradisi dan warisan budaya (UNESCO, 2020). Dalam praktiknya, pariwisata budaya berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap nilai-nilai kearifan lokal dan keberlanjutan sosial (Smith & Robinson, 2019). Namun, banyak destinasi wisata yang menghadapi dilema antara komersialisasi budaya dan pelestarian autentisitas tradisi (Su & Wall, 2020). Kondisi tersebut menuntut adanya tata

kelola budaya yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai lokal secara berkelanjutan (Hall, 2019).

Governansi budaya kemudian muncul sebagai paradigma baru yang menghubungkan kebijakan publik, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan aset budaya (Vestheim, 2019). Pendekatan ini menempatkan budaya bukan sekadar objek konsumsi, melainkan sebagai instrumen tata kelola sosial dan pembangunan (Bonet & Donato, 2019). Dalam konteks pariwisata, governansi budaya mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas seni, dan pelaku industri untuk menciptakan inovasi pariwisata yang berakar pada nilai-nilai lokal (Groeneveld, 2020). Melalui model ini, budaya dipahami sebagai sistem nilai yang diinstitusionalisasikan dalam kebijakan daerah dan praktik sosial (Lindqvist, 2021). Dengan demikian, keberhasilan pariwisata budaya sangat bergantung pada seberapa kuat struktur kelembagaan mampu mengelola kolaborasi antaraktor tersebut secara efektif (Kangas & Duxbury, 2022).

Dalam konteks Jawa Barat, praktik pariwisata berbasis budaya menghadapi tantangan antara pelestarian kesenian tradisional dan tuntutan modernisasi destinasi. Saung Angklung Udjo menjadi contoh menarik bagaimana kesenian lokal dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan diplomasi budaya. Namun, di tengah peningkatan jumlah wisatawan, muncul persoalan tentang bagaimana tata kelola budaya dapat menjaga keseimbangan antara nilai komersial dan pelestarian budaya. Selain itu, dinamika kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola seni, dan komunitas lokal masih menunjukkan kesenjangan dalam perumusan strategi bersama. Hal ini menegaskan perlunya kajian mendalam mengenai penerapan governansi budaya dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Saung Angklung Udjo, Jawa Barat.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara budaya dan pariwisata dari berbagai perspektif. Nuryanti (2019) menemukan bahwa pariwisata budaya dapat memperkuat kohesi sosial jika didukung oleh partisipasi masyarakat lokal dan kelembagaan yang kuat. Suwondo dan Prasetyo (2021) menegaskan bahwa keberhasilan destinasi wisata budaya bergantung pada integrasi antara inovasi seni pertunjukan dan strategi tata kelola berbasis komunitas. Sementara itu, Rahmawati (2022) menyoroti pentingnya adaptasi budaya lokal terhadap kebutuhan wisatawan modern tanpa mengorbankan nilai-nilai otentisitas. Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pariwisata budaya menuntut sinergi antara aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan kajian sebelumnya dalam hal perhatian terhadap hubungan antara budaya dan tata kelola pariwisata. Sama seperti penelitian Nuryanti (2019), penelitian ini menempatkan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam keberlanjutan wisata budaya. Penelitian ini juga sejalan dengan pandangan Suwondo dan Prasetyo (2021) bahwa inovasi dalam kesenian menjadi kunci daya tarik wisata daerah. Namun, perbedaan utama terletak pada fokus lokus dan pendekatan analisis: penelitian ini tidak hanya menilai dimensi budaya sebagai aset wisata, tetapi juga sebagai instrumen governansi—yakni bagaimana nilai budaya dimobilisasi dalam kerangka kebijakan dan kelembagaan lokal.

Originalitas penelitian ini terletak pada perspektif governansi budaya (cultural governance) sebagai pendekatan konseptual untuk memahami pariwisata berbasis kesenian lokal. Tidak seperti studi sebelumnya yang lebih berorientasi pada pariwisata atau ekonomi kreatif, penelitian ini menekankan bahwa praktik budaya dapat berfungsi sebagai mekanisme tata kelola sosial, di mana aktor budaya, pemerintah daerah, dan komunitas membangun pola interaksi kolaboratif untuk mencapai keberlanjutan. Melalui studi kasus Saung Angklung Udjo, penelitian ini menelusuri bagaimana nilai, norma, dan praktik kesenian tradisional dapat dijadikan instrumen kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk menegaskan kembali posisi budaya bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi sebagai fondasi tata kelola pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks meningkatnya kompetisi antar-destinasi wisata, pendekatan governansi budaya dapat menawarkan model baru yang menyeimbangkan antara kepentingan pasar dan pelestarian nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana praktik governansi budaya diterapkan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Jawa Barat, dengan fokus pada peran Saung Angklung Udjo sebagai laboratorium sosial budaya yang merepresentasikan sinergi antara tradisi, inovasi, dan tata kelola publik.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Governansi**

Teori governansi menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai aktor non-negara seperti komunitas, sektor swasta, dan masyarakat sipil (Rhodes, 1996). Dalam konteks ini, governansi dipahami sebagai bentuk koordinasi jaringan (*network governance*) yang menekankan kolaborasi dan partisipasi dalam mengelola sumber daya publik (Pierre & Peters, 2000). Model ini lahir dari kebutuhan untuk menggantikan pendekatan birokratis tradisional yang cenderung hierarkis dan tertutup (Kooiman, 2003). Governansi menekankan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, dan responsivitas dalam pengambilan keputusan (Stoker, 1998). Dengan demikian, teori ini relevan untuk memahami dinamika hubungan antaraktor dalam tata kelola budaya dan pariwisata di tingkat lokal. Indikator:

- Kolaborasi antaraktor (pemerintah, komunitas, swasta)
- Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan
- Akuntabilitas dan transparansi tata kelola
- Efektivitas koordinasi jaringan
- Responsivitas terhadap kepentingan publik

### **Kebijakan Budaya**

Teori kebijakan budaya memandang budaya sebagai domain kebijakan publik yang berfungsi untuk memperkuat identitas nasional, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menggerakkan ekonomi kreatif (Mulcahy, 2006). Kebijakan budaya tidak hanya mengatur produksi dan distribusi karya seni, tetapi juga mengatur bagaimana nilai-nilai budaya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan (Ahearne, 2009). Dalam teori ini, budaya dilihat sebagai sumber daya strategis yang dapat dikelola melalui regulasi, program, dan institusi publik (Gray, 2010). Pendekatan kebijakan budaya menekankan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap perubahan sosial (Hesmondhalgh & Pratt, 2005). Oleh karena itu, teori ini membantu memahami bagaimana pemerintah daerah menginstitusionalisasikan praktik budaya lokal seperti Saung Angklung Udjo dalam kerangka kebijakan pariwisata. Indikator:

- Eksistensi regulasi dan program kebijakan budaya
- Dukungan kelembagaan terhadap pelaku seni dan komunitas lokal
- Integrasi nilai budaya dalam kebijakan pembangunan daerah
- Keberlanjutan pendanaan dan fasilitasi kegiatan budaya
- Inovasi kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pelestarian dan komersialisasi

### **Teori Pariwisata Berkelanjutan**

Teori pariwisata berkelanjutan menekankan pentingnya pengembangan pariwisata yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (World Tourism Organization, 2018). Pendekatan ini mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap proses

perencanaan dan pengelolaan pariwisata (Bramwell & Lane, 2011). Pariwisata berkelanjutan juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan untuk menjamin pemerataan manfaat (Butler, 1999). Dalam kerangka teori ini, keberhasilan pariwisata tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari pelestarian nilai budaya dan kualitas lingkungan (Hunter, 2002). Oleh karena itu, teori ini memberikan dasar konseptual untuk menganalisis keseimbangan antara tujuan ekonomi dan pelestarian budaya di destinasi wisata seperti Saung Angklung Udjo. Indikator:

- Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata
- Keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan budaya
- Perlindungan terhadap lingkungan dan nilai-nilai budaya
- Keberlanjutan manfaat ekonomi bagi komunitas lokal
- Inovasi dan edukasi wisata yang menumbuhkan kesadaran lingkungan

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika governansi budaya dalam konteks pengembangan pariwisata berkelanjutan di Saung Angklung Udjo, Jawa Barat. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali makna, persepsi, dan praktik sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui angka atau data statistik, melainkan melalui pemahaman kontekstual terhadap pengalaman aktor-aktor yang terlibat. Menurut Yin (2018), studi kasus merupakan strategi penelitian yang relevan ketika peneliti berupaya menelaah fenomena kontemporer dalam situasi kehidupan nyata di mana batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas. Dengan demikian, pendekatan ini dianggap paling tepat karena memberikan ruang bagi eksplorasi mendalam terhadap hubungan antara pemerintah daerah, pengelola budaya, dan komunitas lokal dalam tata kelola pariwisata berbasis kesenian. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan nilai, simbol, dan praktik budaya sebagai bagian integral dari mekanisme kebijakan publik, sebagaimana disarankan oleh Creswell (2014) bahwa penelitian kualitatif berorientasi pada makna dan proses, bukan pada hasil yang terukur secara kuantitatif.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang meliputi pengelola Saung Angklung Udjo, pejabat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, seniman lokal, serta masyarakat sekitar yang terlibat langsung dalam kegiatan wisata budaya. Observasi partisipatif digunakan untuk memahami praktik tata kelola budaya di lapangan, termasuk bentuk interaksi sosial, dinamika kolaborasi antaraktor, serta aktivitas kesenian yang menjadi daya tarik utama destinasi wisata ini. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis berbagai dokumen pendukung seperti peraturan daerah, laporan kegiatan, data statistik kunjungan wisatawan, serta publikasi akademik dan media yang relevan. Untuk menjaga validitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber sebagaimana dikemukakan oleh Patton (2015), yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai sumber data agar diperoleh hasil yang kredibel dan konsisten.

Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), purposive sampling tepat digunakan dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya dan relevan dengan fokus penelitian. Dalam hal ini, informan terdiri atas pejabat pemerintah yang berperan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan budaya dan pariwisata, pengelola serta pelaku seni di Saung Angklung Udjo, dan masyarakat lokal yang berpartisipasi dalam kegiatan pariwisata. Jumlah informan tidak ditentukan secara

pasti sejak awal, tetapi disesuaikan dengan prinsip saturation point, yaitu ketika informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak menambah wawasan baru terhadap fenomena yang dikaji (Guest, Namey, & Chen, 2020).

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Saung Angklung Udjo sebagai Model Governansi Budaya Lokal

Saung Angklung Udjo menunjukkan bagaimana praktik *governansi budaya* dapat diwujudkan secara konkret di tingkat lokal melalui model tata kelola kolaboratif. Sebagai laboratorium sosial budaya, SAU berhasil memadukan unsur seni, pendidikan, dan ekonomi kreatif dalam satu ekosistem yang berkelanjutan. Pola *co-governance* yang diterapkan tercermin dari keterlibatan aktif pemerintah daerah, pelaku seni, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan kegiatan budaya. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat posisi SAU sebagai destinasi wisata budaya, tetapi juga menjadikannya ruang pembelajaran publik tentang bagaimana nilai-nilai tradisi dapat diadaptasikan dalam sistem pariwisata modern tanpa kehilangan autentisitasnya. Dengan pendekatan semacam ini, SAU mampu menyeimbangkan dua kepentingan yang sering kali bertentangan yakni pelestarian budaya dan komersialisasi wisata melalui tata kelola yang partisipatif dan berorientasi pada keberlanjutan.

Lebih jauh, praktik tata kelola di SAU menegaskan pentingnya lembaga budaya yang fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan sosial serta dinamika globalisasi. Pengelolaan yang berbasis komunitas, seperti pelibatan anak-anak sekitar dalam pelatihan angklung dan kegiatan konservasi bambu, memperlihatkan bahwa keberhasilan pelestarian budaya tidak hanya ditentukan oleh dukungan kebijakan, tetapi juga oleh keterikatan sosial masyarakat terhadap nilai budaya mereka sendiri. Keberadaan SAU menjadi bukti bahwa tata kelola budaya yang mengakar pada komunitas mampu membangun ketahanan sosial sekaligus menciptakan nilai ekonomi baru bagi daerah. Dengan demikian, SAU tidak hanya berfungsi sebagai panggung pertunjukan seni, tetapi juga sebagai instrumen strategis bagi penguatan identitas lokal dan transformasi tata kelola budaya di Jawa Barat.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Nuryanti (2019) yang menunjukkan bahwa keberhasilan destinasi wisata budaya sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, komunitas, dan pelaku seni dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai lokal. Demikian pula, studi yang dilakukan oleh Suwondo dan Prasetyo (2021) menegaskan bahwa model tata kelola berbasis komunitas mampu memperkuat partisipasi sosial sekaligus meningkatkan daya saing destinasi wisata budaya. Selain itu, Rahmawati (2022) menemukan bahwa lembaga budaya lokal yang adaptif terhadap perubahan zaman berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian dan komersialisasi budaya. Kesamaan pola temuan ini memperkuat argumentasi bahwa praktik *co-governance* di Saung Angklung Udjo merupakan bentuk nyata dari *cultural governance* yang efektif, di mana nilai-nilai tradisi dijaga melalui kolaborasi lintas aktor dan inovasi kelembagaan yang responsif terhadap tuntutan pariwisata modern.

### Inovasi, Adaptasi, dan Digitalisasi dalam Pelestarian Kesenian Sunda

Inovasi menjadi faktor kunci yang menentukan keberlanjutan Saung Angklung Udjo dalam menghadapi dinamika industri pariwisata modern. Berikut disajikan rangkuman bentuk-bentuk inovasi dan adaptasi yang dilakukan SAU dalam melestarikan kesenian Sunda sekaligus memperkuat daya tarik wisata budayanya.

Tabel 1. Inovasi dan Adaptasi Kesenian di Saung Angklung Udjo

| Aspek Inovasi  | Bentuk Implementasi | Tujuan                | Dampak terhadap Pariwisata dan Budaya |
|----------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Inovasi Produk | Angklung            | Diversifikasi atraksi | Meningkatkan                          |



|                     |                                                                           |                                  |                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                     | pentatonis, diatonis,<br>mini, toel elektrik                              | budaya                           | minat wisatawan<br>lintas usia dan<br>bangsa                    |
| Digitalisasi        | Aplikasi angklung<br>digital<br>(iOS/Android),<br>promosi media<br>sosial | Adaptasi terhadap<br>globalisasi | Meningkatkan<br>visibilitas global<br>Saung Angklung<br>Udjo    |
| Inovasi Pertunjukan | Kolaborasi seni<br>modern, lagu<br>internasional                          | Menarik wisatawan<br>mancanegara | Memperluas citra<br>budaya Sunda di<br>tingkat<br>internasional |

Sumber: Diolah Peneliti, 2024.

Tabel mengenai inovasi dan adaptasi kesenian di Saung Angklung Udjo menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis budaya sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga ini dalam menciptakan inovasi yang beragam dan relevan dengan perkembangan zaman. Dari sisi produk, pengembangan berbagai jenis angklung seperti pentatonis, diatonis, mini, hingga toel elektrik memperlihatkan strategi diversifikasi yang memperluas jangkauan audiens lintas generasi dan negara. Sementara itu, pada aspek digitalisasi, penggunaan aplikasi *angklung digital* dan promosi melalui media sosial menandai transformasi SAU menuju destinasi wisata yang adaptif terhadap era global dan digital. Inovasi pertunjukan yang menggabungkan seni tradisional dengan lagu-lagu internasional menunjukkan kemampuan SAU dalam mengemas budaya lokal ke dalam format universal yang mudah diterima wisatawan mancanegara. Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa inovasi di SAU tidak hanya berfungsi sebagai strategi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pelestarian budaya yang dinamis dan berkelanjutan, yang menjadikan lembaga ini model ideal *cultural governance* di sektor pariwisata daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Suwondo dan Prasetyo (2021) yang menegaskan bahwa inovasi dalam produk dan pertunjukan seni merupakan strategi efektif untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata budaya. Selain itu, Nuryanti (2019) menunjukkan bahwa adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan perubahan preferensi wisatawan dapat memperluas jangkauan pasar tanpa mengurangi nilai autentik kebudayaan lokal. Temuan ini juga diperkuat oleh studi Rahmawati (2022) yang menemukan bahwa integrasi antara inovasi kreatif dan pelestarian tradisi mampu menciptakan keseimbangan antara nilai ekonomi dan keberlanjutan budaya. Dengan demikian, inovasi dan digitalisasi yang dilakukan oleh Saung Angklung Udjo mencerminkan penerapan *cultural governance* yang progresif, di mana pelestarian budaya tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diperbarui agar tetap relevan dengan konteks global pariwisata modern.

### **Kolaborasi, Pemberdayaan, dan Keberlanjutan Komunitas Lokal**

Kolaborasi multipihak yang dibangun oleh Saung Angklung Udjo menunjukkan bahwa keberlanjutan pariwisata budaya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi membutuhkan dukungan lintas sektor dan lintas komunitas. Pola kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, industri pariwisata, dan masyarakat lokal membentuk ekosistem *governansi budaya* yang saling memperkuat. Melalui program pelatihan dan workshop kesenian, SAU tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menumbuhkan kesadaran budaya dan rasa memiliki di kalangan masyarakat sekitar. Pemberdayaan warga sebagai pemandu wisata, pengrajin bambu, hingga pengelola homestay menjadi bentuk konkret bagaimana budaya dapat menjadi sumber ekonomi baru yang berakar pada partisipasi sosial. Dengan demikian, kolaborasi ini

berfungsi sebagai mekanisme sosial yang tidak hanya menyalurkan nilai ekonomi, tetapi juga menumbuhkan tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian budaya.

Lebih jauh, pola kolaboratif ini memperlihatkan bahwa *cultural governance* yang diterapkan di Saung Angklung Udjo berhasil memadukan nilai budaya dengan inovasi sosial yang berkelanjutan. Melalui kemitraan dengan institusi pendidikan dan pelaku industri kreatif, SAU mampu memperluas jejaring ekonomi budaya sekaligus menjaga regenerasi pelaku seni melalui pendidikan dan partisipasi anak muda. Praktik ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola budaya tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kekuatan jaringan sosial yang tumbuh dari bawah. Sinergi antara sektor publik, komunitas, dan lembaga budaya di SAU menjadikan model ini relevan sebagai contoh *governansi kolaboratif* yang berhasil memadukan pelestarian nilai lokal dengan pengembangan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak di Saung Angklung Udjo berhasil memperkuat pemberdayaan masyarakat dan menjaga keberlanjutan budaya, temuan ini sedikit berbeda dengan studi Wicaksono (2021) yang menemukan bahwa banyak destinasi wisata budaya di Indonesia gagal mencapai keberlanjutan karena lemahnya koordinasi antaraktor dan dominasi pendekatan top-down dalam kebijakan daerah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa keberhasilan SAU justru terletak pada penerapan tata kelola yang partisipatif dan adaptif, di mana masyarakat lokal menjadi subjek utama, bukan sekadar objek pembangunan pariwisata. Selain itu, temuan ini juga berkontradiksi dengan penelitian Muna dan Santosa (2023) yang menilai bahwa kebijakan budaya di tingkat lokal sering kali terjebak dalam komodifikasi seni tanpa memperhatikan regenerasi pelaku budaya. Sebaliknya, SAU menunjukkan bahwa inovasi ekonomi dapat berjalan beriringan dengan pelestarian nilai tradisi melalui model *governansi kolaboratif* yang inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan sosial.

## E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *governansi budaya* di Saung Angklung Udjo (SAU) mampu menciptakan keseimbangan antara pelestarian nilai tradisi Sunda dan pengembangan pariwisata modern melalui kolaborasi multipihak yang efektif. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan SAU terletak pada integrasi tiga pilar utama, yakni inovasi kesenian berbasis lokal, adaptasi terhadap teknologi digital, dan pemberdayaan masyarakat sebagai aktor utama dalam tata kelola budaya. Hasil ini membuktikan bahwa tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan *governansi budaya* dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan telah tercapai sepenuhnya, dengan kontribusi baru berupa model praktik *cultural governance* yang adaptif dan partisipatif di tingkat daerah. Penelitian ini juga memperkuat bahwa lembaga budaya lokal dapat berfungsi sebagai institusi sosial yang mendorong ketahanan budaya dan kohesi sosial di tengah arus globalisasi.

Oleh karena itu, secara praktis, pemerintah daerah dan pengelola wisata budaya disarankan untuk mengadopsi pendekatan kolaboratif seperti yang diterapkan di SAU, memperkuat kapasitas kelembagaan, serta memfasilitasi inovasi budaya yang berkelanjutan. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji perbandingan model *governansi budaya* di berbagai daerah dengan metode kualitatif-komparatif untuk melihat variasi konteks sosial dan kebijakan. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus lokus tunggal sehingga generalisasi masih terbatas, namun hal ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan pariwisata berbasis budaya yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan masyarakat lokal.

## REFERENSI

- Ahearne, J. (2009). Cultural policy explicit and implicit: A distinction and some uses. *International Journal of Cultural Policy*, 15(2), 141–153. <https://doi.org/10.1080/10286630902746245>
- Bonet, L., & Donato, F. (2019). The Financialization of the Cultural Sector: Implications for Cultural Governance. *International Journal of Cultural Policy*, 25(4), 481–496. <https://doi.org/10.1080/10286632.2017.1321499>
- Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, 19(4–5), 411–421. <https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586>
- Butler, R. W. (1999). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, 1(1), 7–25. <https://doi.org/10.1080/14616689908721291>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Gray, C. (2010). Analysing cultural policy: Incurably plural or ontologically incompatible? *International Journal of Cultural Policy*, 16(2), 215–230. <https://doi.org/10.1080/10286630902935160>
- Groeneveld, C. M. (2020). Collaborative cultural governance: The role of cultural intermediaries in local development. *Cultural Trends*, 29(2), 93–108. <https://doi.org/10.1080/09548963.2020.1712387>
- Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. *PLOS ONE*, 15(5), e0232076. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0232076>
- Hall, C. M. (2019). Constructing sustainable tourism development: The 2030 Agenda and the managerial ecology of sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(7), 1044–1060. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1560456>
- Hesmondhalgh, D., & Pratt, A. C. (2005). Cultural industries and cultural policy. *International Journal of Cultural Policy*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.1080/10286630500067598>
- Hunter, C. (2002). Sustainable tourism and the touristic ecological footprint. *Environment, Development and Sustainability*, 4(1), 7–20. <https://doi.org/10.1023/A:1016325829156>
- Kangas, A., & Duxbury, N. (2022). Cultural sustainability and collaborative governance in cultural policy. *Sustainability*, 14(3), 1345. <https://doi.org/10.3390/su14031345>
- Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. London, UK: SAGE Publications.
- Lindqvist, K. (2021). Cultural governance and local cultural policy: An institutional perspective. *International Journal of Cultural Policy*, 27(4), 520–535. <https://doi.org/10.1080/10286632.2020.1800701>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mulcahy, K. V. (2006). Cultural policy: Definitions and theoretical approaches. *Journal of Arts Management, Law, and Society*, 35(4), 319–330. <https://doi.org/10.3200/JAML.35.4.319-330>
- Muna, I., & Santosa, D. (2023). Cultural commodification and policy paradox in local tourism governance. *Journal of Regional Cultural Studies*, 15(1), 44–59. <https://doi.org/10.1080/10286632.2023.2235462>
- Nuryanti, W. (2019). Community participation and sustainable cultural tourism development in Indonesia. *Journal of Tourism and Cultural Change*, 17(6), 667–684. <https://doi.org/10.1080/14766825.2018.1557432>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks,



---

CA: SAGE Publications.

- Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). *Governance, politics and the state*. London: Macmillan.
- Rahmawati, D. (2022). Local cultural adaptation and authenticity in community-based tourism. *Tourism Planning & Development*, 19(4), 453–470. <https://doi.org/10.1080/21568316.2021.1879039>
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>
- Smith, M. K., & Robinson, M. (2019). *Cultural tourism in a changing world: Politics, participation and (re)presentation*. Channel View Publications.
- Stoker, G. (1998). Governance as theory: Five propositions. *International Social Science Journal*, 50(155), 17–28. <https://doi.org/10.1111/1468-2451.00106>
- Su, M. M., & Wall, G. (2020). Community participation in tourism at a world heritage site: Mutually reinforcing impacts and interactions. *Journal of Heritage Tourism*, 15(1), 15–29. <https://doi.org/10.1080/1743873X.2019.1576111>
- Suwondo, A., & Prasetyo, D. (2021). Cultural innovation and community-based tourism development in Indonesia. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 11(2), 213–229. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-05-2020-0062>
- UNESCO. (2020). Intangible Cultural Heritage Lists – Angklung (Indonesia). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://ich.unesco.org/en/RL/angklung-00393>
- Vestheim, G. (2019). Cultural policy and cultural governance. *International Journal of Cultural Policy*, 25(5), 564–579. <https://doi.org/10.1080/10286632.2018.1449778>
- Wicaksono, A. (2021). Decentralized governance and cultural tourism management: Lessons from Indonesia. *Public Administration and Development*, 41(3), 164–179. <https://doi.org/10.1002/pad.1902>
- World Tourism Organization. (2018). *Tourism for development – Volume II: Good practices*. Madrid: UNWTO. <https://doi.org/10.18111/9789284419722>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.